



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Faktor Idiosinkratik Donald Trump dan Pengaruhnya
terhadap Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok
(2018-2020)**

Skripsi

Oleh

Caroline Siane

6091801072

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Faktor Idiosinkratik Donald Trump dan Pengaruhnya
terhadap Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok
(2018-2020)**

Skripsi

Oleh

Caroline Siane

6091801072

Pembimbing

Sapta Dwikardana, Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Caroline Siane
Nomor Pokok : 6091801072
Judul : Faktor Idiosinkratik Donald Trump dan Pengaruhnya terhadap Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok (2018-2020)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada 10 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota

Prof. Sukawarsini Djelantik, Dra, M.Int,S, Ph.D.

Sekretaris

Sapta Dwikardana, Ph.D.

Anggota

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Caroline Siane

NPM : 6091701072

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Faktor Idiosinkratik Donald Trump dan Pengaruhnya
terhadap Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok
(2018-2020)

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku jika di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 27 Desember 2021



Caroline Siane

ABSTRAK

Nama : Caroline Siane
NPM : 6091801072
Judul : Faktor Idiosinkratik Donald Trump dan Pengaruhnya
terhadap Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok
(2018-2020)

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Bill Clinton di 1993 hingga akhir pemerintahan Barack Obama di 2015 memiliki hubungan dengan Tiongkok yang kooperatif, tetapi juga konfliktual. Meskipun memiliki nuansa konfliktual, tidak ada perang dagang yang terjadi. Namun, ketika di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat menginisiasi perang dagang dengan Tiongkok pada tahun 2018. Sebelumnya, tidak ada penelitian yang membahas isu ini dengan kerangka teori *Personality as a Factor in Foreign Policy Making* oleh Aamir Ahmed Khuhro. Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian "Bagaimana pengaruh faktor idiosinkratik Donald Trump terhadap perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 sampai 2020?" dengan menggunakan metode kualitatif atau secara lebih mendalam metode penelitian psikografi. Adapun tulisan ini berada dalam studi hubungan internasional karena menyangkut kebijakan luar negeri, spesifiknya pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di tingkat individu, di mana pengambilan keputusan di tingkat individu dapat berdampak terhadap hubungan antar dua negara. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa faktor idiosinkratik Trump yang mencakup pandangan terhadap dunianya yang konfliktual berpengaruh terhadap kebijakan perang dagang, seperti terus memberikan ancaman dan hukuman terhadap Tiongkok. Selain itu, faktor idiosinkratik gaya berpolitik pribadi Trump yang transaksional juga berpengaruh dan terlihat ketika perjanjian *Phase One* lebih banyak menguntungkan Amerika Serikat dan kepentingan pribadinya, meskipun Trump memiliki batas kemampuan dari perilaku kebijakan luar negeri yang rendah. Ini disebabkan oleh Trump yang ingin menjadi dominan dalam pengambilan keputusan. Akhirnya, ambisi Trump untuk menjadi pemenang, dominan, dan pandangannya yang konfliktual membuat perang dagang berlangsung sejak 6 Juli 2018 dengan berbagai ancaman dan hukuman dari Amerika Serikat ke Tiongkok, sekaligus membuat perang dagang dapat dihentikan sementara di 15 Januari 2020.

Kata kunci: Donald Trump, faktor idiosinkratik, perang dagang, Amerika Serikat, Tiongkok

ABSTRACT

Nama : Caroline Siane
NPM : 6091801072
Judul : *Idiosyncratic Factor of Donald Trump and Its Influence to United States and China's Trade War (2018-2020)*

The United States under the Bill Clinton administration in 1993 until the end of the Barack Obama administration in 2015 had cooperative, but also conflictual, relationship with China. Although the relationship between the two has a conflictual nuance, no trade war occurred. However, under the Trump administration, the United States initiated a trade war with China in 2018. There was no research that discussed this issue with Personality as a Factor in Foreign Policy Making framework by Aamir Ahmed Khuhro. This research is done to answer the research question "How does Donald Trump's idiosyncratic factor influence the United States and China's trade war in 2018 to 2020?" by using qualitative methods or precisely political personality profiling research methods. This paper is in the study of international relations because it involves foreign policy, specifically foreign policy decision-making at the individual level, where decision-making at the individual level can have an impact on foreign policy of a country to another country. In this research, it was found that Trump's idiosyncratic factors, which include his conflictual view of the world, has an effect on to The United States trade war policy, such as continuing to threaten and punish China. Trump's transactional personal political style idiosyncratic factor is also influential and can be seen when the Phase One agreement was more beneficial for the United States and his personal interest, despite Trump's low extent of repertoire of foreign policy. This is because Trump wants to be dominant in decision-making. Finally, Trump's ambition to be the winner, dominant, and his conflictual views have made the United States and China trade war that took place on July 6, 2018 filled with various threats and punishments from the United States to China, as well as making the trade war temporarily suspended on January 15, 2020.

Keywords: *Donald Trump, idiosyncratic factors, trade war, United States, China*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang tepat. Dengan bantuan dosen pembimbing penulis. Sapta Dwikardana, Ph.D., tulisan skripsi yang berjudul “Faktor Idiosinkratik Donald Trump dan pengaruhnya terhadap Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok (2018-2020)” dapat selesai. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana faktor idiosinkratik Donald Trump memiliki peran penting terhadap kebijakan luar negeri perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 sampai 2020. Adapun penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti ilmu hubungan internasional lain yang ingin mengkaji faktor idiosinkratik Donald Trump.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih untuk orang tua, adik, sahabat-sahabat terdekat, dan teman-teman lainnya yang senantiasa memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun, tulisan ini masih memiliki beberapa kekurangan yang dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti lainnya di masa depan. Tak hanya itu, peneliti pun terbuka terhadap kritik dan saran terkait tulisan penelitian ini sehingga dapat menjadi lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak mudah bagi penulis karena pada saat yang bersamaan, penulis memiliki berbagai kegiatan lain yang meliputi kursus *digital marketing* dan magang. Akan tetapi, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih atas sosok yang disampaikan dalam bagian ini.

Pertama, Mas Sapta Dwikardana

Terima kasih, Mas Sapta, sudah membantu penulisan skripsi saya dan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terlebih saya sangat sering bertanya melalui Whatsapp. Semoga Mas Sapta bisa sehat selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan proses operasinya. Sekali lagi, terima kasih, mas!

Kedua, Mba Suke Djelantik

Terima kasih, Mba Suke, atas bantuannya dalam penulisan seminar sejak awal semester 6 sampai pertengahan semester 6. Selamat juga atas gelar guru besarnya mba. Saya harap Mba Suke bisa sehat selalu dan bahagia selalu juga. Terima kasih, mba.

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan.....	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Singkatan.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
BAB I	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	13
1.2.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Kegunaan Penelitian	15
1.5 Kajian Pustaka	15
1.7 Metode Penelitian	30
1.8 Teknik Pengumpulan Data	30
1.9 Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II	33
Perjalanan Hidup Donald Trump dan Pengaruhnya terhadap Ciri Kepribadian Donald Trump	33
2.1 Masa Kecil, Remaja, dan Perjalanan Karier Donald Trump	34
2.1.1 Masa Kecil Donald Trump.....	34
2.1.2 Masa Remaja Donald Trump	37
2.1.3 Perjalanan Karier Donald Trump.....	41
2.2 Faktor Idiosinkratik Donald Trump.....	51

2.2.1 Kepercayaan.....	51
2.2.2 Motivasi	53
2.2.3 Pandangan terhadap Dunia	58
2.2.4 Gaya Pengambilan Keputusan	60
2.2.5 Gaya Interpersonal	65
2.2.6 Gaya Berpolitik Pribadi	67
BAB III	72
Faktor Idiosinkratik Donald Trump dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Luar Negeri Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok	72
3.1 Pengaruh Penyaring Faktor Idiosinkratik Donald Trump terhadap Perilaku Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat	73
3.1.1 Ketertarikan terhadap Hubungan Luar Negeri.....	73
3.1.1.1 Tingkat Perhatian terhadap Kebijakan Luar Negeri.....	76
3.1.2 Pelatihan atau Kemampuan dalam Hubungan Luar Negeri.....	78
3.1.2.1 Batas Kemampuan dari Perilaku Kebijakan Luar Negeri	80
3.1.3 Sensitivitas terhadap Lingkungan	83
3.1.3.1 Tingkat Keterbukaan terhadap Perubahan	85
3.2 Hubungan Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok dari 2018 sampai 2020	89
3.3 Ciri Kepribadian Donald Trump dan Pengaruhnya terhadap Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.....	98
BAB IV	103
Kesimpulan	103
Daftar Pustaka	107

DAFTAR SINGKATAN

AIIB	: <i>Asia Infrastructure Investment Bank</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
AS	: Amerika Serikat
BRI	: <i>Belt and Road Initiative</i>
EPA	: <i>Environmental Protection Agency</i>
G20	: <i>Group of 20</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
INF	: <i>Intermediate-Range Nuclear Forces</i>
ISIS	: <i>The Islamic State of Iraq and Syria</i>
JCPOA	: <i>The Joint Comprehensive Plan of Action</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LTA	: <i>Leadership Trait Analysis</i>
MFN	: <i>Most Favored Nation</i>
NAFTA	: <i>North American Free Trade Agreement</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NDB	: <i>New Development Bank</i>
NSC	: <i>National Security Council</i>
NSS	: <i>National Security Strategy</i>
NYMA	: <i>New York Military Academy</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
PSM	: <i>Psycho-Social Milieu</i>
SCO	: <i>Shanghai Cooperation Organization</i>
TK	: Taman Kanak-kanak
TPP	: Trans-Pacific Partnership
UNRWA	: <i>United Nations Relief and Works Agency</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
USTR	: <i>United States Trade Representative</i>
WTC	: <i>World Trade Center</i>
WTO	: <i>World Trade Order</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Linimasa pra dan saat perang dagang AS dan Tiongkok pada 2018-2020.....	70
-----------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka <i>Personality as a Factor in Foreign Policy Making</i>	23
-----------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan ekonomi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah berlangsung cukup lama. Tiongkok yang menjadi *rising power* di bidang ekonomi ditandai dengan naiknya Deng Xiaoping sebagai presiden di tahun 1978¹ dengan harapan Tiongkok tidak menjadi negara tertinggal². Dahulu, kebijakan luar negeri ini disebut sebagai kebijakan “*taoguang yanghui*” yang berarti tetap menjadi negara yang *low-profile* dan tidak mengambil peran kepemimpinan di sistem internasional.³ Sistem ekonomi di Tiongkok sebelumnya bersifat tradisional dan kemudian mulai berubah menjadi ekonomi pasar.⁴ Setelah dilakukannya liberalisasi pasar di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi negara tersebut langsung berkembang pesat. Upaya yang dilakukan oleh Deng adalah memperluas kegiatan ekspor dan impor negara. Jiang Zemin, presiden Tiongkok selanjutnya sejak 1993 sampai 2003,⁵ kemudian mengubah orientasi kebijakan luar negeri Tiongkok menjadi “*duojihua de shijie*”, di mana Tiongkok menjadi negara dengan pandangan dunia

¹ Reuters, “TIMELINE: China milestones since 1978,” diakses 20 April 2021, <https://www.reuters.com/article/us-china-reforms-chronology-sb-idUKTRE4B711V20081208>.

² Charles Goodhart dan Chenggang Xu, “The rise of China as an economic power,” *National Institute Economic Review* 155, no. 1 (1996): 59, <https://doi.org/10.1177/002795019615500104>, diakses 20 April 2021.

³ Xiaoxiong Yi, “Chinese Foreign Policy in Transition: Understanding China's “Peaceful Development”,” *The Journal of East Asian Affairs* 19, no. 1 (2005): 75, diakses 23 April 2021.

⁴ Goodhart, op. cit. 56.

⁵ *Britannica*, “Jiang Zemin,” diakses 23 April 2021, <https://www.britannica.com/biography/Jiang-Zemin>.

yang multipolar.⁶ Namun, kepemimpinan Hu Jintao sejak 2003⁷ mengubah kecenderungan kebijakan luar negeri Tiongkok, sehingga kepentingan nasional Tiongkok akan lebih diutamakan.⁸

Produk Domestik Bruto (PDB) dari Tiongkok pada tahun 1978⁹ adalah 149.541 miliar *United States Dollar* (USD). Sedangkan, pada tahun 1993 atau tahun awal pemerintahan Bill Clinton, angka PDB terdapat di 444.731 miliar USD, hingga pada tahun 2018 PDB Tiongkok sebesar 13.893 triliun USD dan 14.28 triliun USD di tahun 2019.¹⁰ Pertumbuhan ekonominya dari 1978 dalam dua dekade sudah mencapai 9%. Menjadikannya sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.¹¹ Namun, liberalisasi ekonomi Tiongkok tidak membuatnya mengikuti norma dan aturan dalam sistem internasional.¹² Tiongkok dianggap seringkali melakukan *free-riding* dan mencari celah untuk tidak mengikuti aturan bermain yang ada untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, AS membentuk *comprehensive engagement* melalui peningkatan frekuensi kunjungan AS ke Tiongkok dan pertukaran kunjungan pejabat tinggi kedua negara, serta kontak antar militer pada 1993.¹³ Demikian, pada November 1993, Clinton bertemu dengan Jiang Zemin kemitraan strategis yang konstruktif dengan Tiongkok. Adapun ini dapat terjadi

⁶ Yi, op. cit. 75.

⁷ *Britannica*, "Hu Jintao," diakses 23 April 2021, <https://www.britannica.com/biography/Hu-Jintao>.

⁸ Yi, op. cit. 76.

⁹ Reuters, op. cit.

¹⁰ *The World Bank*, "GDP (current US\$) – China," diakses 20 April 2021, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=CN&start=1978>.

¹¹ Nicholas R. Lardy, "The economic rise of China: threat or opportunity?," *Federal Reserve Bank of Cleveland* 1 (2003): 1, diakses 20 April 2021.

¹² C. Fred Bergsten, et. al, *China's rise: Challenges and opportunities* (Washington: Peterson Institute, 2008): 12, diakses 20 April 2021.

¹³ Yi Edward Yang, "Leaders' conceptual complexity and foreign policy change: Comparing the Bill Clinton and George W. Bush foreign policies toward China," *The Chinese Journal of International Politics* 3, no. 4 (2010): 426, doi: 10.1093/cjip/poq015, diakses 16 Januari 2022.

karena terdapat pengaruh faktor idiosinkratik Clinton, di mana Clinton memiliki pemahaman yang tinggi terhadap konsep yang kompleks, mau mendengarkan dan dapat menerima informasi baru, sehingga ia mampu mengganti arah kebijakan luar negeri AS yang sebelumnya menggunakan hambatan dagang sebagai konsekuensi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tiongkok.

Namun, kebijakan luar negeri AS terhadap Tiongkok berubah ketika Presiden George W. Bush (Junior) menyatakan bahwa Tiongkok adalah kompetitor strategis.¹⁴ Hal ini disebabkan oleh faktor idiosinkratik Bush yang cenderung mencampurkan pendekatan dirinya secara pribadi ke pekerjaannya sebagai presiden. Perspektifnya terhadap suatu isu hanya terbatas pada pandangan hitam dan putih, stereotipe, tidak kritis terhadap persepsi AS terhadap Tiongkok yang sudah ada sebelumnya.¹⁵ Ia juga berencana untuk membawa AS lebih dekat dengan Jepang. Hanya saja, pandangan Bush akan Tiongkok sedikit berubah ketika terjadinya terorisme di gedung *World Trade Center* (WTC), AS. Bush kemudian mengkaji ulang kebijakannya untuk Tiongkok dengan melakukan *rebalance*. Pada era tersebut, Tiongkok menjadi mitra penting AS untuk melawan terorisme, meskipun di saat yang bersamaan AS sudah mulai waspada dengan kebangkitan Tiongkok. Selama duduknya Bush di kursi kepresidenan, hubungan AS dan Tiongkok masih dapat digolongkan sebagai hubungan bilateral yang relatif baik. Terutama ketika Bush serta keluarganya mengunjungi Tiongkok untuk

¹⁴ Zhao Suisheng, "Shaping the Regional Context of China's Rise: how the Obama administration brought back hedge in its engagement with China," *Journal of Contemporary China* 21, no. 75 (2012): 371, doi:10.1080/10670564.2011.647428, diakses 24 Maret 2021.

¹⁵ Yang, op. cit. 438.

menyaksikan upacara pembukaan *Beijing Olympic Games* pada tahun 2008.¹⁶ Perubahan kebijakan luar negeri ini disebabkan oleh adanya kejadian besar di WTC, sehingga perspektif Bush terhadap Tiongkok pun berangsur menjadi membaik.¹⁷

Setelah masa pemerintahan Bush yang berakhir di 20 Januari 2009, AS dipimpin oleh Presiden Barack Obama sejak tahun 2009.¹⁸ Sebelumnya, Zheng Bijian, mantan wakil ketua *Central Party School* menyampaikan istilah baru kebijakan luar negeri Tiongkok, yaitu “*China Peaceful Rise*” pada tahun 2003.¹⁹ Setelah naiknya Obama sebagai presiden di tahun 2009, AS memiliki kebijakan luar negeri terhadap Tiongkok yang cenderung bersifat bersahabat dan tidak ofensif.²⁰ Ketika ia memerintah, Obama menginginkan hubungan AS dan Tiongkok yang bersifat kooperatif di berbagai isu yang memiliki dampak bagi kedua negara.²¹ Obama pun menunda pertemuan dengan Dalai Lama, pemimpin agama asal Tibet yang pada masa pemerintahan George H. W. Bush dan merupakan salah satu mitra terpenting AS. Ia lebih memilih untuk menemui presiden Tiongkok pada masa itu, Hu Jintao terlebih dahulu. Selain itu, Barack Obama juga menyebut Tiongkok sebagai mitra strategisnya. Ini membuktikan langkah besar yang diambil oleh AS, terutama ketika istilah mitra strategis pada masa pra Obama hanya diberikan kepada

¹⁶ Rosemary Foot dan Amy King, "Assessing the deterioration in China–US relations: US governmental perspectives on the economic-security nexus," *China International Strategy Review* 1, no. 1 (2019): 40, doi:10.1007/s42533-019-00007-w, diakses 24 Maret 2021.

¹⁷ Yang, op. cit. 444.

¹⁸ *History, Art & Archives*, "Presidents, Vice Presidents, & Coinciding Sessions of Congress," diakses 20 April 2021, <https://history.house.gov/Institution/Presidents-Coinciding/Presidents-Coinciding/>.

¹⁹ Hiroko Okuda, "China's "peaceful rise/peaceful development": A case study of media frames of the rise of China" *Global Media and China* 1, no. 1-2 (2016): 125, doi:10.1177/2059436416646275, diakses 24 Maret 2021.

²⁰ John Pomfret, "America vs. Chia: A competitive face-off between two Pacific powers," *Washington Post*, diakses 23 Maret 2021, <https://www.washingtonpost.com/graphics/national/obama-legacy/relations-with-china.html>.

²¹ Suisheng, op. cit. 372.

mitra senior. Obama juga mengatakan bahwa AS memiliki peran untuk memastikan kebangkitan Tiongkok berlangsung secara damai.²²

Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor idiosinkratik Obama, spesifiknya kepercayaan Obama, terkait AS yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.²³ Kutipannya dari Thomas Jefferson di *The Audacity of Hope* yang menyatakan bahwa seluruh manusia itu sama di hadapan Pencipta. Dalam teks tersebut juga tertulis bahwa seluruh manusia berarti memiliki hak yang tidak dapat diambil, yaitu hak untuk kehidupan, kebebasan, dan bahagia. Obama mempercayai pernyataan ini sebagai dasar dari kepercayaan warga Amerika yang memiliki hak untuk mengutamakan kepentingannya masing-masing yang berhubungan dengan kepentingan orang lain juga. Oleh sebab itu, Obama sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Ini secara verbal juga disebutkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, pada tahun 2009 dalam kunjungannya ke Tiongkok. Menurutnya, sebuah kesalahan bagi AS untuk tidak berhubungan dengan negara lain hanya karena perbedaan nilai negara atau demokrasi dalam konteks AS. Selain itu, Obama juga merupakan sosok presiden yang cenderung terbuka dan memiliki keinginan untuk memahami informasi dari orang lain.²⁴

Meskipun demikian, sikap AS terhadap Tiongkok yang cenderung bersahabat tidak berlangsung lama karena adanya tekanan krisis ekonomi yang membuat AS memprioritaskan kepentingannya dan karena Tiongkok yang dianggap AS tidak

²² Jia Qingguo, "Exception to the rule: the Obama administration and China-US relations," *The Korean Journal of Defense Analysis* 22, no. 2 (2010): 254, doi:10.1080/10163271003750527, diakses 22 Maret 2021.

²³ Stephen J. Wayne, *Personality and Politics: Obama For and Against Himself* (Washington DC: CQ Press, 2012) 38, diakses 22 Maret 2021.

²⁴ Alexander Moens, "Obama's Foreign Policy: Change Without Conviction," di *International Politics in Times of Change*, (Heidelberg: Springer, 2012), 37.

ingin menurunkan prioritas kepentingannya juga.²⁵ Hal ini ditunjukkan oleh kunjungan Obama ke Tiongkok untuk bertemu para pelajarnya, ditemani oleh Hu Jintao. Namun, pertemuan tersebut tidak disiarkan secara langsung dan pertanyaan-pertanyaan bertema spesifik seperti perdagangan, mata uang, Iran, dan lain-lain tidak boleh dibahas. Hasil pertemuan Obama dan Hu Jintao disiarkan setelah sesi tanya jawab Obama disensor.²⁶ Situasi tersebut kemudian berlanjut ketika Tiongkok tidak akan mengimplementasikan sistem pasar bebas, sehingga Obama menganggap Tiongkok sebagai “*free rider*” di ekonomi internasional. Terutama karena bagi Obama, Tiongkok mendapatkan keuntungan dari sistem perdagangan internasional, tetapi tidak ingin mengambil tanggungjawab di dalamnya. Adapun ini dapat disebabkan oleh pola pikir Obama yang cenderung pragmatis daripada bergantung pada sebuah ideologi.²⁷

Hubungan antar kedua negara, AS dan Tiongkok pun tidak semakin membaik. Diawali dengan adanya perdamaian antar kedua negara, kemudian berlanjut pada adanya hubungan yang tegang antar AS dan Tiongkok, sampai pada persaingan permasalahan ekonomi yang menjadi kompetisi bagi keduanya.²⁸ Pada tahun 2009 sampai 2012, permasalahan ekonomi seperti ketidakseimbangan neraca perdagangan dan mata uang RMB membuat AS mengeluarkan kebijakan *anti-dumping*, investigasi *countervailing*, adanya tarif tertentu sebagai sanksi, hingga meluncurkan berbagai gugatan. Kebijakan luar negeri *Pivot to Asia* juga dilakukan pada masa pemerintahan Obama sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan

²⁵ Suisheng, op. cit. 370.

²⁶ Pomfret, op. cit.

²⁷ Moens, op. cit. 36.

²⁸ Wang Jisi dan Hu Ran, "From cooperative partnership to strategic competition: A review of China–US relations 2009–2019," *China International Strategy Review* 1, no. 1 (2019): 2, doi:10.1007/s42533-019-00007-w, diakses 22 Maret 2021.

negara Asia Timur lainnya, Jepang dan Korea Selatan, bukan meninggalkan Tiongkok.²⁹ AS menganggap kebijakan luar negeri ini merupakan upaya *rebalancing* dan menyatakan juga bahwa kebijakan tersebut diluncurkan untuk memaksimalkan kerjasama dengan Tiongkok.³⁰

Lalu, pada tahun 2013 hingga tahun 2016, AS dan Tiongkok memilih untuk menghindari konflik demi mengatasi masalah keamanan siber.³¹ Namun, dibentuknya *Belt and Road Initiative* (BRI), *New Development Bank* (NDB), dan pemfasilitasan perluasan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), serta *Asia Infrastructure Investment Bank* (AIIB), membuat AS waspada dan meninggalkan kepentingannya akan proposal Tiongkok mengenai pembangunan model baru hubungan negara besar. Selain itu, ditemukannya bagi AS bahwa Tiongkok memata-matai AS melalui siber untuk mengetahui dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kondisi ekonomi negara seperti *blueprint*, desain, dan teknologi juga semakin memperkeruh hubungan antar keduanya.³²

Dibentuknya AIIB oleh Tiongkok pun akhirnya juga berusaha dihambat oleh Obama pada masa pemerintahannya.³³ Halangan tersebut diusahakan AS dengan membentuk *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di mana para negara anggota yang terlibat akan membahas perjanjian dagang.³⁴ Ini digunakan untuk menurunkan tarif dan menghapus perlindungan perusahaan milik negara di kawasan benua Asia-Pasifik.³⁵ Obama pada tahun 2016, terkait TPP, menyebutkan bahwa AS

²⁹ Pomfret, op. cit.

³⁰ Rosemary, op. cit. 45.

³¹ Jisi, op. cit. 3.

³² Rosemary, op. cit. 43.

³³ Ibid., 45.

³⁴ Cheng Li, "Assessing U.S.-China relations under the Obama administration," *Brookings*, diakses 23 Maret, 2021, <https://www.brookings.edu/opinions/assessing-u-s-china-relations-under-the-obama-administration/>.

³⁵ Rosemary, op. cit. 46.

membentuk TPP sebagai bentuk persaingan dengan Tiongkok yang jika secara ekonomi semakin mengejar posisi AS, maka AS akan dirugikan dalam sektor lapangan pekerjaan, bisnis, dan barang. Demikian, menurut Obama, seharusnya yang mengatur cara bermain dalam perdagangan adalah AS dan mitranya, bukan Tiongkok.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang muncul. Masalah pertama adalah pada masa pemilihan umum AS atau Agustus 2000, salah satu kandidat presiden, George W. Bush menyebut Tiongkok sebagai “kompetitor strategis” dan bukan kekuatan *status quo* di Asia, melainkan negara yang ingin mengganggu *balance of power* di Asia.³⁶ Namun, tiba-tiba pada pertengahan tahun 2001, AS di bawah perintah Bush menjadi mitra dekat Tiongkok secara konstruktif.³⁷ Sebelumnya, AS juga menganggap Tiongkok sebagai “tantangan utama AS di Asia”. Hal tersebut disampaikan pada Agustus 2000 saat skema pemilihan diterapkan oleh *Republican National Convention*. AS saat dipimpin Bush juga menganggap bahwa Tiongkok tidak boleh memaksakan peraturan di Taiwan dan AS akan selalu bersedia untuk membantu Taiwan.³⁸ Meskipun, Bush memang tidak ingin Taiwan menyatakan kemerdekaan mereka dan

³⁶ Yu Wanli, "Breaking the Cycle?: Sino-US Relations under George W. Bush Administration," *China's Shift: Global Strategy of the Rising Power, NIDS Joint Research Series 3* (2009): 84, diakses 31 Maret 2021.

³⁷ Jean Garrison dan Marc Wall, "The rise of hedging and regionalism: An explanation and evaluation of president Obama's China policy," *Asian Affairs: An American Review* 43, no. 2 (2016): 52, doi:10.1080/00927678.2016.1166892, diakses 31 Maret 2021.

³⁸ Wanli, op. cit. 85.

jika terjadi konflik perang yang dimulai oleh Taiwan, maka AS memilih untuk diam.

Tak hanya itu, insiden konflik pesawat AS yang masuk ke dalam teritorial langit Laut Tiongkok Selatan pada 1 April 2001 menambah sentimen baru kedua negara.³⁹ Namun, posisi AS berubah secara tiba-tiba sejak bulan Oktober 2001 ketika ia berjanji untuk datang ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) di Shanghai, mengabaikan pandangan yang menganggap Bush tidak perlu datang karena AS baru saja mengalami terorisme pada 11 September 2001.⁴⁰

Kedua, Bush dalam hubungannya yang baik dengan Tiongkok tetap berusaha melindungi AS dari kebangkitan Tiongkok.⁴¹ Bush pun memberikan kritik bagi Tiongkok yang terlibat dalam urusan negara yang bermasalah dan pandangan merkantilismenya mengenai sumber daya dan mengubah istilah Tiongkok sebagai *responsible stakeholder*. Pada KTT APEC, presiden Tiongkok pada saat itu, Jiang Zemin membahas hubungan Sino-AS dan permasalahan terorisme, di mana pada akhir percakapan, keduanya memutuskan untuk bekerja sama melawan terorisme.⁴²

Padahal, pada waktu yang bersamaan hubungan AS dan Tiongkok masih dalam ranah kerja sama, sebagaimana ditunjukkan dalam slogan 3C; *candid, constructive, dan cooperative*.⁴³ Posisi AS terhadap Taiwan pun juga berubah menjadi anti-kemerdekaan Taiwan di tengah kedua hubungan AS dan Tiongkok.⁴⁴ Namun

³⁹ Ibid., 86.

⁴⁰ Ibid., 87.

⁴¹ Ibid., 93.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 94.

⁴⁴ Ibid., 93.

demikian, Bush tetap merasa waspada akan kebangkitan Tiongkok, sekaligus mengkritik Tiongkok.

Masalah ketiga adalah semakin buruknya hubungan AS dan Tiongkok seiring berjalannya waktu sejak 2009, periode kedua menjabatnya Barack Obama⁴⁵ sebagai presiden, sebab AS sempat menganggap Tiongkok sebagai mitra kerja sama. Namun, semakin lama AS terlibat dalam berbagai pergesekan di berbagai isu, salah satunya perdagangan. Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah, Obama mengawali kariernya sebagai presiden dengan berusaha menjadikan Tiongkok sebagai mitra kerja sama bagi AS.⁴⁶ Demikian, ia mendukung Tiongkok untuk aktif dan mengikuti peraturan dan normal yang diterima secara global, berharap Tiongkok ingin menjadi mitranya secara konstruktif⁴⁷. Keduanya pun memiliki hubungan bilateral yang baik dalam bidang perdagangan, *exchange rates*, dan HAM. Ditambah istilah *3Cs* Bush diubah pemerintahan Obama menjadi *positive, cooperative, dan comprehensive*.

Hubungan ini tidak berlangsung lama dan mulai mengarah pada persaingan kedua negara, terutama ketika terdapat kebijakan luar negeri *Pivot to Asia* oleh AS yang kemudian diubah namanya menjadi *Rebalance to Asia* dengan interpretasi AS yang kembali fokus ke kepentingannya di Asia.⁴⁸ TPP juga dibentuk oleh AS sebagai salah satu organ kebijakan luar negeri "*Rebalance to Asia*", digunakan untuk menahan penyerapan seluruh keuntungan ekonomi⁴⁹ dalam bidang

⁴⁵ Jisi, op. cit. 1.

⁴⁶ Garrison, op. cit. 52.

⁴⁷ Ibid., 52.

⁴⁸ Jacques DeLisle, "International law in the Obama administration's pivot to Asia: the China seas disputes, the Trans-Pacific Partnership, rivalry with the PRC, and status quo legal norms in US foreign policy," *Case W. Res. J. Int'l L.* 48 (2016): 146, doi:10.1163/2468-1733_shafir_SIM260100036, diakses 31 Maret 2021.

⁴⁹ Ibid., 164.

perdagangan oleh Tiongkok dan perkembangan AIIB, NDB, BRI, dan SCO⁵⁰ serta mempertahankan *status quo* yang telah ada di Asia⁵¹. Dalam regulasinya, AS di bawah pemerintahan Obama mengatur TPP sedemikian rupa dan menyatakan bahwa negara manapun diperbolehkan tergabung dalam TPP, selama bersedia untuk mengikuti standarisasinya yang ketat.⁵² Pernyataan tersebut lalu mengucilkan Tiongkok karena bagi AS, Tiongkok selalu berusaha keluar dari peraturan yang telah ada. Demikian, anomali yang muncul adalah adanya perubahan sikap AS secara drastis sejak dikeluarkannya kebijakan luar negeri *Rebalance to Asia*. Padahal, dahulu AS dengan Obama pada masa pemerintahannya yang pertama ingin bekerja sama dalam menangani isu global bersama Tiongkok.

Permasalahan yang keempat terletak pada bagaimana pada pemerintahan Trump di AS, tidak hanya hubungan AS dan Tiongkok yang semakin memburuk, tetapi keduanya lalu terlibat dalam perang dagang yang pertama kali diinisiasi oleh Trump melalui dinaikkannya tarif produk Tiongkok yang senilai 34 miliar USD dalam Daftar 1.⁵³ Selain itu, Trump juga berencana untuk mengenakan tarif 25% bagi barang impor Tiongkok yang totalnya 16 miliar USD per Agustus 2018.⁵⁴ Tiongkok pun merespon sesuai dengan serangan tarif yang diberikan oleh AS, di mana AS kembali membalasnya dengan mengenakan 25% tarif terhadap produk

⁵⁰ Jisi, op. cit. 3.

⁵¹ DeLisle, op. cit. 164.

⁵² Ibid., 170.

⁵³ Chad P. Bown, "The US–China Trade War and Phase One Agreement," *Journal of Policy Modeling* (2021); 9, <https://www.piie.com/sites/default/files/documents/wp21-2.pdf>.

⁵⁴ *South China Morning Post*, "What is the US-China trade war?," diakses 24 Maret 2021, <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3078745/what-us-china-trade-war-how-it-started-and-what-inside-phase>.

impor Tiongkok yang nilainya sebesar 100 juta USD. Tak hanya itu, Trump juga menyebut Tiongkok sebagai ‘manipulator mata uang’.⁵⁵

Menurut Trump pada tahun 2018, kebijakan Tiongkok terkait perdagangan dan ekonomi sudah tidak dapat ditoleransi lebih lanjut.⁵⁶ Dalam *United Nations General Assembly* 2018, Trump menyebutkan, meskipun ia menghormati Xi Jinping layaknya teman, tetapi ketidakseimbangan dalam perdagangan ini sudah tidak dapat diterima oleh AS karena sejak bergabungnya Tiongkok dalam *World Trade Order* (WTO), AS telah kehilangan kesempatan bekerja di bidang *manufacturing* sebanyak 3 juta dan hampir satu per empat dari seluruh pekerjaan di sektor baja. Hal ini berdampak dengan fakta bahwa Trump merupakan salah satu presiden AS dengan kepribadian yang berbeda dari pendahulu-pendahulunya.⁵⁷ Ia seringkali disebut sebagai seseorang yang unik, tidak terduga, dan suka mengambil konsekuensi yang bahkan dianggap cukup berbahaya. Tak jarang bagi Trump disebut sebagai *black swan* dari presiden-presiden AS sebelumnya. Demikian, perang dagang menjadi salah satu perubahan dan pencetus kebijakan luar negeri AS yang cukup drastis dalam hubungannya dengan Tiongkok, meskipun dalam beberapa tahun terakhir sebelum terjadinya perang dagang, AS dan Tiongkok bersaing ketat dengan Tiongkok.

⁵⁵ *BBC News*, “Trump accuses China of ‘manipulating’ its currency,” diakses 28 Maret 2021, <https://www.bbc.com/news/business-45251091>.

⁵⁶ Bob Bryan, “Trump puts China on blast during UN speech, says Beijing’s economic policies ‘cannot be tolerated’,” *Business Insider*, diakses 30 Maret 2021, <https://www.businessinsider.com/trump-china-unga-un-speech-video-2018-9?r=US&IR=T>.

⁵⁷ Stanley Allen Renshon, *The Real Psychology of the Trump Presidency* (Los Angeles: Palgrave Macmillan, 2020), 3, diakses 25 Maret 2021.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis berfokus pada Donald Trump sebagai aktor. Hal ini disebabkan Donald Trump merupakan presiden AS yang memulai perang dagang dengan Tiongkok.⁵⁸ Tidak hanya itu, peneliti juga memiliki ketertarikan dalam menelaah Donald Trump sebagai sosok yang tidak memiliki latar belakang dalam bidang politik sebelumnya, melainkan hanya tergabung dalam partai dan merupakan seorang pebisnis. Kemudian, isu yang diangkat oleh penulis adalah perang dagang AS dan Tiongkok karena permasalahan ekonomi antara AS dan Tiongkok telah berlangsung sejak lama dan berdampak terhadap perekonomian dunia, sebagaimana didukung oleh *working paper* Pablo Fajgelbaum dan Amit Khandelwal, bahwa perang dagang berdampak pada (1) pergerakan negatif pasar ekuitas, (2) realokasi aktivitas ekspor dan impor dari masing-masing negara, sehingga setiap terdapat tarif balasan, (3) penyerapan tenaga kerja di AS berkurang, (4) harga barang ekspor AS semakin mahal di kancan internasional karena masyarakat tidak lagi mengandalkan barang impor, (5) harga produk impor AS yang semakin mahal.⁵⁹ Batas waktu dari isu yang diangkat akan dimulai dari 2018, tepatnya 6 Juli 2018, tanggal resmi dimulainya perang dagang oleh AS⁶⁰ dan 2020, tepatnya 15 Januari 2020 ketika perjanjian *Phase One* ditandatangani AS dan Tiongkok⁶¹.

⁵⁸ Chad P. Bown dan Melina Kolb, "Trump's Trade War Timeline: An Up-to-Date Guide," *The Peterson Institute for International Economics (PIIE)*, diakses 21 April 2021, <https://www.piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-trade-war-china-date-guide>.

⁵⁹ Pablo Fajgelbaum dan Amit Khandelwal, "The economic impacts of the us-china trade war." (2021): 13-20, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29315/w29315.pdf, diakses 12 Januari 2022.

⁶⁰ Bown, *The US–China Trade War and Phase One Agreement*, op. cit. 9.

⁶¹ *Ibid.*, 28.

1.2.2 Perumusan Masalah

Menurut Rosenau, faktor idiosinkratik adalah pandangan, tujuan, kelebihan dan kelemahan intelektual aktor, sehingga berpengaruh terhadap bagaimana aktor menganalisis informasi dan mengambil keputusan, latar belakang, kebutuhan emosional, dan kepribadian aktor.⁶² Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri paling besar dalam isu kebijakan luar negeri perang dagang AS dan Tiongkok pada tahun 2018 sampai 2020. Hal ini disebabkan oleh keinginan Trump untuk terus mendominasi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri⁶³ dan hanya akan mendengarkan penasihat dan staf kepresidenan yang setuju akan pendapatnya⁶⁴, sehingga Trump dapat disebut keras kepala. Demikian, faktor lainnya dalam level analisis pengambilan keputusan, seperti kelompok kecil, budaya dan identitas nasional, politik domestik dan oposisi, atribut nasional dan sistem internasional⁶⁵, kurang memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri perang dagang seperti level analisis individu. Oleh sebab itu, mengacu pada identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan teori sebelumnya, maka pertanyaan penelitian bagi penulis adalah **“Bagaimana pengaruh faktor idiosinkratik Donald Trump terhadap perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 sampai 2020?”**

⁶² Bojang AS, “The Study of Foreign Policy in International Relations,” *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 6, no. 4 (2018): 7, doi:10.4172/2332-0761.1000337, diakses 22 Juni 2021.

⁶³ Martha Cottam, “Foreign Policy Decision Making in the Trump Administration,” di *Trump Doctrine and the Emerging International System*, ed. Stanley A. Renchon dan Peter Suedfeld, (Cham: Palgrave Macmillan, 2021), 131.

⁶⁴ Luis Da Vinha, "Competition, conflict, and conformity: Foreign policy making in the first year of the Trump Presidency," *Presidential studies quarterly* 49, no. 2 (2019): 10, doi:10.1111/psq.12509, diakses 20 November 2021.

⁶⁵ Valerie M. Hudson dan Benjamin S. Day, *Foreign policy analysis: classic and contemporary theory*, (Maryland: Rowman & Littlefield, 2019), 4.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perang dagang AS dan Tiongkok dapat terjadi di bawah kepemimpinan Trump pada tahun 2018 sampai 2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki ranah penelitian yang serupa, baik mengenai faktor idiosinkratik Trump dan dampaknya bagi kebijakan luar negeri AS, ataupun perang dagang itu sendiri.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, terdapat beberapa literatur yang dikaji oleh penulis. Tulisan Dr. Muhammad Nadeem Mirza yang berjudul *The Role of Leadership and Idiosyncrasy in US Foreign Policy Towards Pakistan* menyampaikan bahwa idiosinkrasi merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau bahkan kebijakan luar negeri sebuah negara.⁶⁶ Menggunakan teori *Poliheuristic*, di mana dalam mengambil keputusan, pembuat kebijakan luar negeri tidak akan menggunakan sekumpulan pilihan yang tidak sesuai dengan pandangan politik dan nasional. Itulah yang

⁶⁶ Muhammad Nadeem Mirza, "The Role of Leadership and Idiosyncrasy in US Foreign Policy Towards Pakistan," *Journal of Contemporary Studies* 7, no. 02 (2018): 33-34, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3500813, diakses 7 April 2021.

disebut sebagai fase pertama pembentukan kebijakan luar negeri. Fase yang melibatkan proses *cognitive-psychology*, sehingga terdapat simplifikasi matriks keputusan. Fase kedua adalah pengambilan keputusan rasional, di mana kebijakan luar negeri alternatif ditentukan berdasarkan pandangan politik aktor dan kepentingan nasional. Menurut Mirza, pemimpin negara umumnya memiliki pandangan tersendiri terhadap suatu isu. Data yang diberikan kepada pemimpin negara terkait suatu masalah dari sebuah institusi memang menjadi bahan pertimbangan pemimpin untuk menjadi objektif.⁶⁷ Adapun ciri kepribadian presiden AS dipengaruhi oleh keyakinannya, masa lalu, karakteristik kognitif-psikologis, asumsinya tentang dunia, dan ideologi.⁶⁸ Hal ini dapat dilihat seiring pemimpin AS berganti, posisi AS terhadap Pakistan juga cenderung berganti. Layaknya perbedaan kebijakan dan posisi AS terhadap Pakistan ketika dipimpin oleh Presiden Kennedy, Carter, Woodrow Wilson, Ronald Reagan, Bush Senior, Bush Junior, Clinton, Obama, dan Trump.⁶⁹ Trump dengan latar belakang konservatif, pebisnis, dan agresif, memilih untuk mendekat dengan India yang dianggap sebagai sesama korban terorisme. Pendekatannya pun cenderung sugestif, namun tetap agresif.

Artikel jurnal kedua, *Personality and adherence to international agreements* yang ditulis oleh Scott Fitzsimmons menyampaikan bagaimana perilaku kebijakan luar negeri Trump yang tidak terduga dan memiliki rasa tidak suka tertentu pada skema perjanjian internasional.⁷⁰ Adapun Fitzsimmons menggunakan pendekatan

⁶⁷ Ibid., 34.

⁶⁸ Ibid., 44.

⁶⁹ Ibid., 45-48.

⁷⁰ Scott Fitzsimmons, "Personality and adherence to international agreements: the case of President Donald Trump," *International Relations* (2020): 1, doi:10.1177/0047117820965656, diakses 6 April 2021.

Leadership Trait Analysis (LTA) dan menganalisis perilaku aktor; *beliefs* serta *distrust of others* aktor. Pendekatan LTA sendiri berfokus pada bagaimana kepribadian aktor membuat mereka ingin untuk menantang masalah yang ditemukan atau mengikuti arus. Sedangkan, *beliefs* aktor bersangkutan dengan bagaimana aktor percaya ia dapat mengendalikan masalah, mengubah arah masalah tersebut, dan mempengaruhi hasil. *Distrust of others* aktor adalah bagaimana aktor melihat ketulusan orang lain. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa Trump memutuskan untuk keluar dari TPP, *Paris Agreement*, dan proliferasi nuklir Iran.⁷¹ Keputusan tersebut disebabkan oleh adanya peran kepribadian Trump memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kapabilitasnya dan ketidakpercayaan terhadap orang lain.⁷² Ini yang menjadi faktor penyebab utama keluarnya AS di bawah kepemimpinan Trump dari ketiga perjanjian internasional tersebut.

Sharifullah Dorani dengan artikel jurnalnya yang berjudul *The Foreign Policy Decision Making Approaches and Their Applications Case Study: Bush, Obama and Trump's Decision Making towards Afghanistan and the Region* menggunakan pendekatan *Foreign Policy Decision Making* Richard C. Snyder dan kawan-kawannya.⁷³ Pendekatan tersebut menekankan kompetensi aktor, motivasi, dan komunikasinya sebagai faktor dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Dorani juga menggunakan pendekatan *Psycho-Social Milieu* (PSM) Harold dan Margaret Sprout, di mana pendekatan tersebut berfokus pada pikiran aktor yang berisi

⁷¹ Ibid., 2.

⁷² Ibid., 6.

⁷³ Sharifullah Dorani, "The Foreign Policy Decision Making Approaches and Their Applications Case Study: Bush, Obama and Trump's Decision Making towards Afghanistan and the Region," *Indexing & Abstracting* 9, no. 2 (2019), 69-82, https://www.researchgate.net/profile/Hakan-Uslu/publication/335033982_The_Role_of_Social_and_Economic_Factors_on_Fast_Food_Restaurant_Chains/links/5ed837da4585152945310caf/The-Role-of-Social-and-Economic-Factors-on-Fast-Food-Restaurant-Chains.pdf#page=6, diakses 18 September 2021.

kepribadian, *beliefs*, perilaku, nilai, pengalaman, emosi, gaya, ingatan, dan konsepsi personal dan negara. Di bawah tekanan, ciri-ciri kepribadian aktor dapat terlihat dan tercermin dari kebijakannya. Bush, Obama, dan Trump memiliki pandangan terhadap Afghanistan yang berbeda. Bush melihat dirinya sebagai orang ‘baik’ dan para teroris ‘jahat’. Sedangkan, pada masa pemerintahan Obama, pendekatan AS terhadap Afghanistan mulai berubah karena Obama mulai menganggap perang tersebut tidak akan dapat dimenangi. Di sisi lain, Trump mengikuti pola pikir radikalnya dalam menyusun kebijakan luar negeri AS terhadap Afghanistan, tetapi ditolak oleh para ahli dari Republik, pejabat kecil, dan masyarakat AS, sehingga ia akhirnya menarik 400 tentara di Suriah, tetapi belum menarik setengah dari tentara di Afghanistan pada tahun 2019.

Selanjutnya, dalam tulisan *Individual Foreign Policy Analysis of Donald Trump: A Case Study of the US Embassy relocation to Jerusalem*, Kenny Setya Abdiel memilih menggunakan pendekatan *The Great Man Approach* untuk menganalisis kebijakan luar negeri relokasi Kedutaan AS ke Yerusalem pada masa pemerintahan Trump.⁷⁴ Pendekatan tersebut menyatakan bahwa suatu keputusan pemimpin lebih dipengaruhi kepribadiannya, sehingga melemahkan asumsi bahwa negara adalah rasional. Abdiel juga menggunakan konsep *political constraint*; *respect constraint* (mengikuti arus) atau *challenge constraint* (menantang masalah), serta motivasi aktor milik Margaret Hermann. Hasil analisis Abdiel menyatakan bahwa Trump adalah seorang pemimpin yang agresif dan suka mengambil keputusan yang berisiko. Meskipun demikian, ia selalu mengetahui konsekuensi

⁷⁴ Kenny Setya Abdiel, "Individual Foreign Policy Analysis of Donald Trump: A Case Study of the US Embassy relocation to Jerusalem," *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 1 (2020): 15-17, doi:10.18196/hi.91159, diakses 19 September 2021.

tindakan yang ia ambil. Ia pun sosok yang suka terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan ingin mengambil keputusan terakhir, layaknya pada pemilihan kebijakan luar negeri yang di mana AS akhirnya mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Ini dilakukan berdasarkan motifnya yang ingin melindungi para pemuka agama Kristen AS dan orang Yahudi dengan kecenderungan politik Republik.

Di sisi lain, Oliver Turner dan Juliet Kaarbo dalam artikel jurnal *Predictably unpredictable: Trump's personality and approach towards China* menggunakan 4 pendekatan, yakni *Operational Code Analysis*, *Leadership Trait Analysis*, *Motive Analysis*, dan *5 Personality & Dark Triad Traits*.⁷⁵ Secara singkat *Operational Code Analysis* berfokus pada *beliefs* aktor pada dunia politik dan alat-alat yang berpengaruh terhadap hasil hasil kebijakan politik, termasuk krisis diplomasi atau militer, negara lawan, dan sanksi ekonomi. *Leadership Trait Analysis* adalah pendekatan yang menekankan *beliefs* aktor dalam kemampuan untuk mengendalikan suatu isu, sifat (ketidakpercayaan aktor, bias, percaya diri), dan motif. *Motive Analysis* menyatakan terdapat 3 motif aktor, *power*, *achievement*, atau *affiliation*, sehingga berpengaruh terhadap perilaku individu dan cara interaksi aktor. Terakhir, *Big 5 Personality & Dark Triad Traits*; *Big 5 Personality* menilai *extroversion*, *agreeableness*, *conscientiousness*, *neuroticism*, dan *openness to experience* aktor yang dianggap mewakili kecenderungan perbedaan perilaku aktor. *Dark Triad Traits* menilai tingkat *narcissism*, *psychopathy*, dan *Machiavellianism* aktor. Menurut Turner dan Kaarbo, impulsivitas, emosi, provokasi retorikanya,

⁷⁵ Oliver Turner dan Juliet Kaarbo, "Predictably unpredictable: Trump's personality and approach towards China," *Cambridge Review of International Affairs* (2021): 1-20, doi: 10.1080/09557571.2021.1879018, diakses 19 September 2021.

serta kepribadian Trump membuat pendekatan Trump terhadap Tiongkok yang tidak stabil dan tidak konsisten. Kebijakan luar negeri bidang ekonomi yang dihasilkan oleh Trump terhadap Tiongkok biasanya bersifat ekstrim, sehingga membahayakan hubungan diplomatik dan keamanan negara dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu contohnya adalah kebijakan luar negeri perang dagang dengan Tiongkok.

Merujuk dari kelima literatur yang menjelaskan tentang bagaimana kepribadian Trump berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri AS, baik itu kebijakan luar negeri AS terhadap Pakistan, Afghanistan, Kedutaan AS yang dipindahkan ke Yerusalem, keluarnya AS dari TPP, Paris Agreement, perjanjian proliferasi nuklir Iran, dan pendekatan Trump terhadap Tiongkok yang tidak konsisten. Dari seluruh tulisan yang telah ditulis, belum terdapat tulisan yang menjelaskan bagaimana kepribadian Trump, dianalisis dengan konsep *Personality as a Factor in Foreign Policy Making* oleh Aamir Ahmed Khuhro yang berasumsi bahwa *personal characteristics* (ciri kepribadian) aktor; *beliefs* (kepercayaan) dan *motives* (motivasi) yang menghasilkan *view of the world* (pandangan terhadap dunia) serta *decision style* (gaya pengambilan keputusan) dan *interpersonal style* (gaya interpersonal) yang menghasilkan *personal political style* (gaya berpolitik pribadi) aktor mampu berpengaruh terhadap perilaku kebijakan luar negeri aktor.⁷⁶ Apabila *interest in foreign affairs* (ketertarikan terhadap hubungan luar negeri) aktor tinggi, *degree of attention to foreign policy* (tingkat perhatian terhadap kebijakan luar negeri) aktor akan tinggi dan akan membuat pandangan terhadap

⁷⁶ Aamir Ahmed Khuhro, *Personality as a Factor in Foreign Policy Making: A case study of Pak: US Relations during Benazir Bhutto* (Pakistan: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012): 108-109.

dunia serta gaya berpolitik pribadi aktor berpengaruh pada perilaku kebijakan luar negeri.⁷⁷ Jika *training or expertise in foreign affairs* (pelatihan atau kemampuan dalam hubungan luar negeri) aktor tinggi, *extent of repertoire of foreign policy* (batas kemampuan dari perilaku kebijakan luar negeri) keakan tinggi juga, sehingga gaya berpolitik pribadi aktor berpengaruh pada perilaku kebijakan luar negeri.⁷⁸ Lalu, jika *sensitivity to environment* (sensitivitas terhadap lingkungan) rendah, *degree of openness to change* (tingkat keterbukaan terhadap perubahan) aktor juga akan rendah, sehingga membuat pandangan terhadap dunia serta gaya berpolitik pribadi aktor berpengaruh pada perilaku kebijakan luar negeri.⁷⁹ Kemudian, gaya berpolitik pribadi dan pandangan terhadap dunianya akan berpengaruh dalam perilaku kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh aktor.

1.6 Kerangka Teori

Demi menjawab pertanyaan penelitian di atas, digunakan konsep kebijakan luar negeri yang memiliki arti perilaku negara dengan lingkungannya yang bersangkutan dengan bagaimana sebuah tindakan negara, baik secara eksplisit dan implisit, mempengaruhi hubungannya dengan negara lain.⁸⁰ Kebijakan luar negeri tersebut dapat berupa menempatkan posisi negaranya di sistem internasional sampai prinsip negara terhadap suatu masalah internasional. Adapun keputusan

⁷⁷ Ibid., 102.

⁷⁸ Ibid., 103.

⁷⁹ Ibid., 116.

⁸⁰ William Wallace, *Foreign Policy and Political Process*, (London: Macmillan International Higher Education, 1971), 1.

kebijakan luar negeri dapat dianggap sebagai komitmen tingkat tinggi dalam proses aksi, reaksi, dari berbagai level dan melibatkan berbagai jajaran aktor.⁸¹

Hal ini kemudian bersangkutan dengan konsep level analisis kebijakan luar negeri. Beberapa dari level analisis tersebut adalah individu pengambil keputusan, pengambilan keputusan dalam kelompok kecil, budaya dan identitas nasional, politik domestik dan oposisi, atribut nasional dan sistem internasional.⁸² Level analisis yang akan digunakan adalah individu pengambil keputusan, terutama karena level analisis tersebut dipengaruhi oleh adanya rezim tertentu dalam pemerintahan sebuah negara yang memiliki ciri khas tertentu. Hal lain yang dianggap penting juga dalam level analisis ini adalah ketertarikan aktor dalam kebijakan luar negeri, sehingga ciri khas dari aktor dapat terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan.

Digunakan juga konsep perang dagang yang berarti pelarangan ekspor dan impor yang ditujukan ke negara B untuk mencapai kepentingannya, sehingga membuat negara B juga membalas upaya yang serupa, yakni membatasi ekspor dan impor produk dari negara A.⁸³ Apabila hal ini dilakukan, perang dagang dapat memberikan keuntungan sementara bagi negara A. Akan tetapi, jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Adapun perang dagang lahir karena adanya kebijakan proteksionis negara penginisiasi perang dagang, negara A, yang umumnya adalah negara maju. Tidak hanya dapat merugikan kedua negara, perang dagang dapat berdampak bagi perekonomian negara berkembang. Merujuk pada definisi kebijakan luar negeri

⁸¹ Hudson, op. cit. 4.

⁸² Ibid., 40.

⁸³ Hasan Dincer dan Serhat Yüksel, *Strategic Priorities in Competitive Environments*. (Gewerbestrasse: Springer International Publishing, 2020), 325.

pada dua paragraf sebelumnya, perang dagang merupakan salah satu bentuk dari kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan perang dagang merupakan suatu tindakan yang secara eksplisit mempengaruhi hubungan antara AS dan Tiongkok dalam segi diplomatis dan ekonomi. Tak hanya itu, kebijakan luar negeri perang dagang juga dianggap sebagai aksi dengan komitmen tingkat tinggi karena merisikokan kondisi ekonomi AS. Tidak berbeda dengan kebijakan luar negeri lainnya, kebijakan luar negeri perang dagang juga kemudian, akan digunakan konsep *foreign policy strategy* dari K. J. Holsti yang berarti strategi mendasar negara untuk mencapai tujuan domestik dan internalnya.⁸⁴

Untuk menelaah lebih jauh terkait ciri khas aktor, digunakan psikologi politik di ilmu hubungan internasional yang ditulis oleh Cottam et. al. Konsep psikologi politik dapat digunakan untuk menjelaskan alasan diambilnya keputusan politik, sehingga perilaku politik aktor, baik itu aktor pemimpin negara, teroris, dan lain-lain akan dapat diamati. Dengan mengamati dan menganalisis unsur kepribadian dari aktor, dapat terlihat kelebihan dan kekurangan aktor dalam suatu peristiwa.⁸⁵ Inilah yang kemudian membuat faktor idiosinkratik menjadi penting dalam menentukan kebijakan luar negeri. Faktor idiosinkratik yang merupakan sifat unik dari presiden sebagai individu akan menjadi jembatan eksplanasi alasan Trump melakukan perang dagang dengan Tiongkok.⁸⁶ Selain itu, juga akan digunakan konsep psikobiografi psikoanalisis yang akan menjelaskan masa lalu Trump

⁸⁴ A. P. Rana, "Nonalignment as a Developmental Foreign Policy Strategy: A Conceptual Enquiry into its Systemic Capabilities," *The Indian Journal of Political Science* 41, no. 4 (1980): 589, doi:<https://www.jstor.org/stable/41855050>, diakses 13 April 2021.

⁸⁵ Martha L. Cottam, et. al., *Introduction to political psychology* (New York: Taylor & Francis, 2016), 14.

⁸⁶ *Ibid.*, 41.

melalui perkembangan personal, sosial, dan politik aktor sejak muda sampai dewasa muda.⁸⁷

Untuk menjelaskan penyebab dilakukannya perang dagang pada masa pemerintahan Trump, dapat digunakan konsep faktor idiosinkratik. Menurut Rosenau, faktor idiosinkratik adalah hal-hal yang mencakup pandangan aktor terhadap sistem internasional yang tengah ada, tujuan aktor, kekuatan dan kelemahan intelektual yang dapat mempengaruhi kemampuan analisa informasi dan pengambilan keputusan aktor, masa lalu aktor, kebutuhan emosional aktor, dan kepribadian aktor.⁸⁸ Faktor-faktor tersebutlah yang memiliki andil dalam perencanaan dan diambilnya keputusan sebuah kebijakan luar negeri. Kepribadian bahkan dapat melampaui kognitif aktor ketika sebuah kebijakan diformulasikan dan diputuskan. Oleh sebab itu, kepribadian aktor dapat terpancarkan dari kebijakan luar negeri yang dihasilkan.

Bersangkutan dengan konsep faktor idiosinkratik, dapat digunakan teori *Personality as a Factor in Foreign Policy Making* menekankan pada peran kepercayaan, motivasi, gaya pengambilan keputusan, dan gaya interpersonal dari seorang pemimpin sebagai karakteristik pribadi yang akan berpengaruh pada kebijakan luar negeri yang dihasilkan oleh aktor.⁸⁹ Setiap individu dinilai memiliki karakteristik pribadi yang terukur. Kepercayaan dan motivasi merupakan dua karakteristik yang berpengaruh langsung terhadap pandangan aktor terhadap dunia. Sedangkan, gaya pengambilan keputusan dan gaya interpersonal menjadi penentu gaya berpolitik seseorang secara pribadi. Keduanya lalu mampu berpengaruh

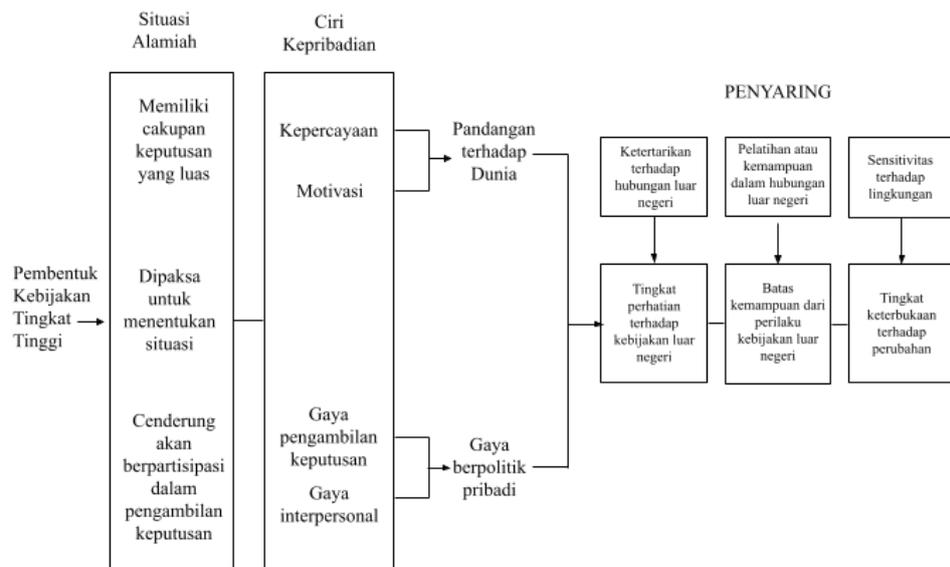
⁸⁷ Ibid., 30.

⁸⁸ AS, op. cit. 7.

⁸⁹ Khuhro, op. cit. 108.

terhadap perilaku kebijakan luar negeri berdasarkan dari hasil analisis dari 3 *filter* (penyaring); ketertarikan terhadap hubungan luar negeri terhadap tingkat perhatian terhadap kebijakan luar negeri, pelatihan atau kemampuan dalam hubungan luar negeri terhadap batas kemampuan dari perilaku kebijakan luar negeri, dan sensitivitas terhadap lingkungan terhadap tingkat keterbukaan terhadap perubahan. Faktor idiosinkratik ini dapat ditunjukkan sesuai kerangka berikut.

Gambar 1.1 Kerangka *Personality as a Factor in Foreign Policy Making*



Sumber: Personality as a Factor in Foreign Policy Making: A case study of Pak: US

Relations during Benazir Bhutto⁹⁰

Merujuk pada gambar 1.1, terdapat kepercayaan sebagai asumsi pribadi aktor mengenai dunia. Adapun kepercayaan juga dapat dilihat dari bagaimana pandangan aktor terhadap konflik, pandangannya terhadap kedaulatan dan superioritas, dan

⁹⁰ Ibid., 107.

lain-lain.⁹¹ Keyakinan aktor politik ketika mengendalikan sebuah masalah akan menjadi dasar dari seluruh keputusan yang diambil oleh aktor. Kepercayaan juga yang menjadi pengaruh besar terhadap pemahaman dan interpretasi aktor terhadap lingkungannya. Sedangkan, motivasi dapat muncul dan mempengaruhi interpretasi lingkungan dan strategi yang digunakan oleh pemimpin politik. Motivasi yang menjadi alasan aktor untuk melakukan apa yang dilakukannya atau alasan keputusan kebijakan luar negeri yang diambil. Apabila aktor merupakan sosok yang memiliki orientasi terhadap sebuah pencapaian, maka ia biasanya akan lebih kooperatif di awal dengan harapan lawannya akan menjadi kooperatif, sehingga hubungan keduanya dapat saling menguntungkan.⁹² Kepercayaan dan motivasi akan mempengaruhi strategi yang dipilih oleh pemimpin politik ketika mengambil keputusan luar negeri.⁹³ Adapun keduanya tergabung dalam pandangan terhadap dunia yang mampu berpengaruh terhadap strategi kebijakan luar negeri yang dibuat oleh aktor.

Selain itu, *gaya pengambilan keputusan* sebagai salah satu bagian dari karakteristik pribadi yang berpengaruh memiliki arti cara atau metode aktor yang lebih disukai dalam mengambil keputusan.⁹⁴ Dalam karakteristik ini, kompleksitas pembentukan dan memproses informasi oleh aktor sangat ditekankan.⁹⁵ Gaya mengambil keputusan ini dapat dilihat dari cara pengambilan keputusan pemimpin politik, pendekatan pembuatan kebijakan yang khusus terlihat dari aktor. Hal-hal

⁹¹ Margaret G. Hermann, "Explaining foreign policy behavior using the personal characteristics of political leaders," *International Studies Quarterly* 24, no. 1 (1980): 8-9, doi:10.2307/2600126, diakses 13 Maret 2021.

⁹² Khuhro, op. cit. 117.

⁹³ Khuhro, op. cit. 106.

⁹⁴ Hermann, op. cit. 9.

⁹⁵ Ibid., 10.

tersebut dapat dikaji dengan melihat keterbukaan aktor terhadap informasi baru, ingin atau tidaknya mengambil risiko kebijakan luar negeri, toleransi terhadap ambiguitas, dan kompleks atau tidaknya struktur dan proses informasi aktor.⁹⁶ Kemudian, gaya interpersonal sebagai salah satu penentu gaya berpolitik seseorang didefinisikan sebagai bagaimana aktor politik pengambil keputusan berinteraksi dengan aktor politik pengambil keputusan lainnya.⁹⁷ Aktor politik dapat memiliki rasa tidak percaya terhadap aktor lain atau bahkan sebaliknya. Gaya pengambilan keputusan dan gaya interpersonal tergabung dalam gaya berpolitik pribadi (gaya berpolitik secara pribadi), di mana konsep ini berpengaruh terhadap gaya pembuatan kebijakan luar negerinya atau perilaku Trump ketika ingin membuat kebijakan luar negeri.⁹⁸

Berpengaruh atau tidaknya kedua *personal characteristics* terhadap perilaku kebijakan luar negeri akan ditentukan oleh 3 penyaring.⁹⁹ Seorang aktor yang memiliki ketertarikan terhadap hubungan luar negeri akan selalu ingin diinformasikan mengenai keadaan terkini hubungan internasional agar kepentingan negaranya tetap didapatkan. Aktor tersebut juga akan lebih waspada terhadap musuhnya di politik.¹⁰⁰ Demikian, aktor akan selalu memberikan perhatian lebih (tingkat perhatian terhadap kebijakan luar negeri) dalam kebijakan luar negeri yang akan dibentuk¹⁰¹ dan lebih terlibat dalam pembentukannya¹⁰². Sedangkan, aktor yang ketertarikan dalam kebijakan luar negerinya rendah memiliki kecenderungan

⁹⁶ Ibid., 9.

⁹⁷ Ibid., 10.

⁹⁸ Khuhro, op. cit. 106.

⁹⁹ Ibid., 102.

¹⁰⁰ Hermann, op. cit. 13.

¹⁰¹ Khuhro, op. cit. 102.

¹⁰² Hermann, op. cit. 13.

untuk mendelegasikan orang lain untuk mengendalikan masalah tertentu, sehingga kepribadiannya kurang terlihat dalam kebijakan luar negeri yang dikeluarkan. Apabila tingkat perhatian terhadap kebijakan luar negeri aktor tinggi, maka pandangan terhadap dunia dan gaya berpolitik pribadi aktor akan terlihat dalam perilaku kebijakan luar negerinya.¹⁰³

Selanjutnya, pelatihan atau kemampuan dalam hubungan luar negeri aktor dapat ditunjukkan dari sudah atau tidak pernahnya aktor memegang posisi politik dan pemerintahan yang memberikan pengetahuan tertentu akan hubungan internasional serta kebijakan luar negeri.¹⁰⁴ Di sini, ketika pengalaman aktor memadai, maka aktor akan berusaha untuk menyesuaikan kebijakan luar negeri yang dibuatnya dalam menangani suatu isu. Kapasitas atau ide dari aktor dalam menangani masalah akan lebih besar (batas kemampuan dari perilaku kebijakan luar negeri). Sebaliknya, aktor dengan pengalaman yang sedikit akan kurang mampu dalam menghadapi isu dan memberikan rencana kebijakan luar negeri. Meskipun, masalah tersebut dapat terselesaikan, tetapi tidak melalui kebijakan luar negeri. Jika aktor batas kemampuan dari perilaku kebijakan luar negeri yang tinggi, maka gaya berpolitik pribadi aktor akan terefleksikan di kebijakan luar negeri negaranya.

Filter ketiga, sensitivitas terhadap lingkungan menunjukkan reaksi individu terhadap stimulus dari objek lingkungan sosialnya¹⁰⁵ dan kemudahan aktor dalam memproses informasi baru demi kepentingan perubahan di lingkungannya¹⁰⁶. Aktor yang sensitif memiliki kecenderungan kebijakan luar negeri yang cara pandanganya cukup terbuka (tingkat keterbukaan terhadap perubahan). Sedangkan, aktor yang

¹⁰³ Khuhro, op. cit. 102.

¹⁰⁴ Ibid., 103.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibid., 116.

kurang sensitif akan sulit untuk mengubah pandangannya terhadap suatu hal dan sulit untuk membedakan masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga responnya terhadap beberapa masalah akan sama. Demikian, hasil kebijakan luar negeri dari aktor yang sensitif terhadap lingkungannya akan cenderung bersifat lebih terbuka terhadap perubahan dan aktor yang kurang sensitif biasanya mengeluarkan kebijakan luar negeri yang lebih kaku dan konvensional. Aktor yang kurang sensitif akan mencocokkan stimulusnya dengan cara pandangannya sendiri. Sedangkan, aktor yang sensitif akan mengubah cara pandangannya sesuai perubahan lingkungannya. Apabila aktor memiliki tingkat keterbukaan terhadap perubahan yang rendah, maka pandangan terhadap dunia dan gaya berpolitik pribadi aktor akan lebih berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri yang dihasilkan.

Faktor idiosinkratik digunakan untuk menelaah lebih dalam kepribadian Trump atau secara spesifik kepribadian politiknya yang berpengaruh pada perilaku kebijakan luar negeri. Faktor tersebut secara spesifik yakni; *personal characteristics* (kepercayaan dan motivasi dalam pandangan terhadap dunia, serta gaya pengambilan keputusan dan gaya interpersonal dalam gaya berpolitik pribadi) dan penyaringnya (tingkat perhatian terhadap kebijakan luar negeri, batas kemampuan dari perilaku kebijakan luar negeri, tingkat keterbukaan terhadap perubahan).¹⁰⁷ Hal ini disebabkan level analisis kebijakan luar negeri yang digunakan adalah individu pemimpin.

¹⁰⁷ Khuhro, op. cit. 107.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode yang menitikberatkan pada pemahaman masalah sosial atau masalah manusia, sehingga penelitian ini akan bersifat induktif dan berfokus pada pemahaman individu dan bagaimana kompleksitas masalah yang dikaji.¹⁰⁸ Lebih spesifik dari kualitatif, akan digunakan metode penelitian psikografi atau *political personality profiling*. Melalui metode penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan kepribadian politik aktor dengan analisis lintas-seksional serta longitudinal, sehingga menggambarkan kepemimpinan aktor.¹⁰⁹ Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji kepribadian aktor, pandangannya terhadap dunia, gaya kepemimpinannya, wawasan aktor tersebut, serta masa lalunya, baik latar belakang keluarga, pendidikan, dan lain-lain.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan pengumpulan data sekunder, di mana penulis akan menggunakan data objek yang “tidak hidup” karena data telah tersedia di berbagai media, tanpa diambil secara langsung di lapangan oleh penulis.¹¹⁰ Data-data tersebut akan digunakan untuk penelitian primer dari penulis dan akan diambil secara daring melalui internet sesuai dengan adanya integrasi teknologi masa kini.¹¹¹ Data yang didapat kemudian akan diolah dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian penulis. Data tersebut dapat berupa

¹⁰⁸ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, (London: SAGE Publications, 2014).

¹⁰⁹ Umar S. Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Pustaka Belajar, 2015), 310.

¹¹⁰ Nanang Martono, *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 3.

¹¹¹ Melissa P. Johnston, "Secondary data analysis: A method of which the time has come," *Qualitative and quantitative methods in libraries* 3, no. 3 (2017): 619, <http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/169/170>, diakses 14 April 2021.

dokumen pribadi, pidato, karya tertulis aktor, dan sumber sekunder lainnya untuk membongkar pengalaman historis aktor.¹¹²

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama atau bab 1 akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan. Selanjutnya, bab 2 akan mendalami perjalanan hidup Donald Trump (masa kecil, masa remaja, perjalanan karier) dan ciri kepribadiannya (kepercayaan, motif, pandangan terhadap dunia, gaya pengambilan keputusan, gaya interpersonal, gaya berpolitik pribadi). Kemudian pada bab 3 akan membahas faktor idiosinkratik Trump dan pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri perang dagang AS dan Tiongkok. Bab tersebut secara spesifik berusaha menjelaskan pengaruh penyaring faktor idiosinkratik Donald Trump terhadap perilaku kebijakan luar negeri Amerika Serikat (ketertarikan terhadap hubungan luar negeri, tingkat perhatian terhadap kebijakan luar negeri, pelatihan dan kemampuan dalam hubungan luar negeri, batas kemampuan dari perilaku kebijakan luar negeri, sensitivitas terhadap lingkungan, tingkat keterbukaan terhadap perubahan), hubungan perang dagang AS dan Tiongkok dari 2018 sampai 2020, dan ciri kepribadian Donald Trump dan pengaruhnya terhadap perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Kemudian,

¹¹² Bakry, op. cit. 310.

bab 4 menjadi bab yang berisi kesimpulan, di mana pertanyaan penelitian akan terjawab.

